

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah sebuah negara yang dihuni lebih dari 200 juta umat manusia dari Sabang sampai Merauke, terbentang di atas ribuan pulau lebih dari 5000 kilometer, dengan ratusan bahasa, suku, adat istiadat, budaya, serta beraneka ragam agama yang terdapat di dunia juga ada di negara kepulauan ini (Emmeson, 2001, hlm xxi). Kesemua itu, merupakan elemen penting yang turut mengkonstruksi Indonesia seperti sekarang ini, sehingga tepatlah untuk mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis.

Pluralisme Indonesia merupakan kekayaan sekaligus modal sosial (*social capital*) yang teramat berharga yang semestinya disyukuri dan dirawat. Pluralisme atau keragaman tersebut sebaliknya justru akan membawa malapetaka bagi negeri ini jika tidak dikelola dengan baik. Selama ini perbedaan-perbedaan tersebut relatif tidak sampai merobek keutuhan dan kesatuan bangsa, meski acap kali mengalami kegoncangan, gangguan dan benturan. Keindahan dan kedamaian dalam perbedaan tersebut tentu saja tidak lepas dari pemahaman yang cukup mendalam terhadap makna pluralisme atau kemajemukan. Berbeda bukan berarti harus bertentangan. Beragam bahasa, budaya, keyakinan dan kelas sosial bukan bermakna harus saling berperang. Sebaliknya, perbedaan tersebut justru memiliki makna yang mendalam untuk membangun kekuatan yang lebih besar.

Upaya menyatukan keberagaman bangsa bukanlah tindakan dengan harga gratis, tetapi telah menjadi sejarah yang cukup panjang dan melelahkan, bahkan telah menguras pikiran dan energi para pendiri republik bernama “Indonesia” ini. Upaya menyatukan keberagaman bangsa Indonesia ini terkait juga dengan keberadaan masyarakat etnis Tionghoa, yang jauh sebelum negeri ini merdeka, bangsa Cina yang disebut dengan etnis Tionghoa, sebagai bagian dari keragaman negeri ini sudah bermukim dan berbaur dengan masyarakat sekitar (Setiono, 2003, hlm. 113).

Sekali pun tidak ada dokumen mengenai kapan pastinya orang-orang Tionghoa masuk Nusantara, berbagai catatan mengemukakan bahwa pada abad ke 16 keturunan Tionghoa telah menyebar dari negara asalnya Tiongkok ke kawasan Nusantara, yang sering dikenal dengan istilah “*overseas Chinese*” (Soemardjan, 1988, hlm. 221). Selanjutnya gelombang kedatangan besar-besaran orang Tionghoa ke Indonesia diperkirakan terjadi hingga XIX di Jawa dan Sumatra (Setiono, 2003, hlm. 81 & 215). Meninggalkan negeri mereka akibat kesulitan hidup dan perang berkepanjangan, kehadiran mereka menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya menurut Koentjaraningrat dalam Soemardjan (1988, hlm. 222) adalah belum terjadinya integrasi antara kehidupan mereka dengan cara atau kebudayaan Indonesia, sehingga masih terdapat garis pemisah antara golongan etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia, yang disebabkan oleh: (1) kebijakan penggolongan masyarakat pemerintah kolonial Belanda yang membuat masyarakat keturunan Tionghoa berbeda dalam kedudukan hukum dan sosial dari masyarakat Indonesia; (2) perasaan *Chinese Culturalism* yang masih sangat kuat.

Sekalipun demikian, masyarakat etnis Tionghoa memang dikenal memiliki budaya bukan hanya bentuk fisik saja melainkan mewujud secara psikis dalam bentuk “Etika Moral” atau “Budi Pekerti” yang justru sangat berharga bukan hanya bagi semua bangsa di dunia ini. Budaya Tionghoa dalam bentuk psikis tidaklah inklusif melainkan bersifat universal serta mampu mengangkat martabat kemanusiaan. Hal ini bisa kita lihat banyaknya buku modern yang membahas masalah kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan pemikiran Confucius, sebagai dasar dari budaya Tionghoa. Pemikiran Confucius, yang menjadi dasar nilai bagi etnis Tionghoa, sangat relevan dapat memajukan martabat manusia secara universal.

Sikap harmonis dalam keluarga dan menjauhkan diri dari konflik serta hidup selaras dengan watak sejati, bersahaja, jujur, dapat dipercaya, bekerja keras, tahan banting, tidak menyakiti orang lain, bijaksana dan seterusnya, merupakan sikap yang bercirikan Ketionghoan. Ciri-ciri di atas merupakan ajaran moral

yang harus dimiliki dan dipahami oleh orang-orang Tionghoa dimanapun berada, termasuk juga yang berada di Indonesia (Kuncono, 2012, hlm 1).

Ciri-ciri positif yang melekat pada diri etnis Tionghoa, ternyata kurang dirasakan justru oleh komunitas asli penduduk Indonesia. Komunitas etnis Tionghoa di Indonesia pada umumnya, dan di Tangerang pada khususnya, dilukiskan memiliki perjalanan yang panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Potret buram etnis Tionghoa begitu kentara dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Periode yang sangat panjang (*longue duree*), diawali dengan kedatangan nenek moyang mulai abad XIV yang akhirnya diikuti migrasi besar-besaran dari Tiongkok abad XIX sampai awal abad XX (Lombard, 1999, hlm. 200).

Perjalanan hidup etnis Tionghoa diwarnai dengan belenggu kebijakan / aturan dan peristiwa kelam. Pada masa Orde Lama diterbitkan PP No. 10 / tahun 1959 yang berisi larangan bagi Warga Negara Tionghoa untuk berdagang eceran di luar ibukota propinsi dan kabupaten. Pemerintah RI juga memberlakukan ketentuan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang “*masih dipertanyakan*” (Effendi, 2008, hlm 38). Pada masa pemerintah Orde Baru, muncul pula Inpres No 14 / tahun 1967 yang disusul SKB Tiga Menteri, yang berisi larangan bagi WNI Tionghoa untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan leluhur mereka (Konghucu), dengan menampilkan tapekong dan baronsai dalam perayaan Tahun Baru Imlek.

Sentimen anti-Tionghoa tumbuh dengan cepat di Indonesia setelah tuduhan percobaan kudeta oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965. Indonesia menengarai Beijing berada di belakang percobaan kudeta. Selanjutnya berimbas kepada Warga Negara Indonesia etnis Tionghoa dalam bentuk kebijakan diskriminatif oleh pemerintahan Orde Baru (Suhandinata, 2009, hlm.352).

Catatan sejarah bangsa Indonesia, menorehkan tinta peristiwa kelam yang dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan/pembantaian massal dan penjarahan. Peristiwa Valckenier di Batavia tahun 1740, Peristiwa Tangerang di Tangerang tahun 1946, dan Peristiwa

Tragedi Mei 1998. Keseluruhan peristiwa tersebut telah mengorbankan jiwa, harta benda, bahkan kehormatan dari kaum hawa warga etnis keturunan Tionghoa, yang merupakan noda hitam sejarah masa lalu negeri ini (Lohanda, 2007a; Setiono, 2002, hlm. 577).

Pertanyaan yang sangat mungkin muncul kepermukaan adalah, “mengapa harus selalu etnis Tionghoa yang menjadi sasaran dari kerusuhan rasial?” Tentu saja tidak ada jawaban tunggal untuk persoalan ini, sebagaimana tidak ada jawaban tunggal untuk persoalan-persoalan social lainnya. Kemungkinan jawaban untuk pertanyaan tersebut dapat ditelisik dari ungkapan-ungkapan beberapa tokoh sejarah. Setidak-tidaknya unsur ketimpangan ekonomiah yang menjadi faktor dominan terjadinya kerusuhan-kerusuhan di atas. Hal tersebut diungkapkan dalam pandangan Marx sebagaimana dikutip oleh Franz Magnis Suseno, bahwa bidang ekonomi merupakan bidang yang akan menentukan kehidupan politik dan pemikiran masyarakat (1999, hlm 51). Marx juga berkeyakinan bahwa “bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi sebaliknya keadaan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka (Suseno, 1999, hlm. 138).

Suryadinata (1984 , hlm 7) memberikan pendapat bahwa ada kesan di benak orang-orang pribumi bahwa orang-orang Tionghoa yang dipandang sebagai “tamuh” justru hidup lebih makmur daripada orang-orang pribumi sebagai tuan rumah. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa di antara mereka memang hidup secara eksklusif. Di samping itu etnis Tionghoa memang sangat patuh dan konsisten dalam mempertahankan kebudayaan dan adat istiadat yang diwarisi dari leluhurnya.

Keberadaan etnis Tionghoa pada perkembangannya telah memunculkan komunitas-komunitas Tionghoa di Indonesia yang tersebar hampir di setiap kota-kota besar. Mereka selanjutnya mendiami suatu wilayah yang kemudian dikenal dengan Kampung Pecinan. Salah satunya adalah komunitas Tionghoa yang terdapat di wilayah Kota Tangerang, yang dikenal dengan sebutan Cina Benteng.

Menurut Oey Tjin Eng, tokoh masyarakat Cina Benteng, (Fuad, 2012, hlm. 39), kata Tangerang diduga berasal dari kata “Tang-Ren” yang berarti Orang Tang. Hal ini bermakna bahwa orang Cina Tangerang adalah orang-orang Cina

yang mempunyai tali ikatan darah dengan Dinasti Tang, atau dapat diartikan merupakan keturunan dari Dinasti Tang.

Etnis Tionghoa yang terdapat di wilayah Kota Tangerang biasa dikenal dengan istilah “Cina Benteng”. Istilah “Cina Benteng” muncul dari adanya sebuah Benteng Makasar yang didirikan pada jaman Kumpeni Belanda yang terletak di tepi sungai Cisadane di kawasan Pusat Kota Tangerang yang sekarang telah rata dengan tanah (Santosa, 2002, hlm. 17).

Tidak seperti etnis Cina pada umumnya. Orang Cina Benteng di kawasan kota Tangerang memiliki ciri-ciri fisik berkulit hitam atau gelap dan bermata lebar, dan hidupnya pas-pasan atau malah miskin. Salah satu kantong kemiskinan wilayah Pecinan di Kota Tangerang adalah wilayah desa Sewan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

Istilah *Sewan* berasal dari kata Sewa atau sewaan. Istilah sewaan ini berasal dari terjadinya sewa menyewa antara sesepuh atau tuan tanah masyarakat Cina Benteng yang menyewa tanah-tanah dari pemerintah Hindia Belanda pada masa lalu. Mereka menyewa tanah cukup luas, dan ketika pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Indonesia, maka tanah-tanah tersebut kemudian dikuasai oleh masyarakat keturunan para penyewa tadi. Masyarakat Cina keturunan Kampung Sewan kemudian mengajukan pemilikan dengan hak milik atas tanah yang telah mereka tempati tersebut melalui Program Sertifikasi Nasional (Prona), walaupun demikian tidak semua tanah-tanah tersebut telah bersertifikat (Fuad, 2012, hlm. 3)

Komunitas Cina Keturunan Kampung Sewan adalah keturunan penduduk Cina yang datang ke Tangerang dengan terdamparnya Tjen Tji Lung pada sekitar abad ke-15 di pantai Tangerang. Gelombang kedua terjadi pada abad ke-18 dari Batavia akibat pembunuhan orang-orang Cina di Batavia pada tahun 1740 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier (Lohanda, 2007a, hlm. 167).

Kehidupan ekonomi masyarakat dan pola kekeluargaan menarik untuk dikaji, karena secara ekonomi komunitas Kampung Sewan merupakan komunitas yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai

sebuah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Secara sederhana, orang miskin dimaknai sebagai orang yang dalam keadaan normal tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan juga munculnya resiko kematian akibat ketidakmampuan tersebut (Dixon & Macarov, 1998, hlm.1). Kemiskinan sendiri tidak dapat diberlakukan absolut dalam setiap wilayah, setiap wilayah sangat bervariasi terhadap tingkat kemiskinan, sehingga kemiskinan dikatakan sebagai kemiskinan relative (*relative poverty*) (Dixon & Macarov, 1998, hlm. 7).

Tingkat kemiskinan penduduk Sewan tampak dari pendapatan rata-rata per hari komunitas Tionghoa di Kampung Sewan pada tahun 2010. Sebanyak 31,7% memiliki pendapatan kurang dari Rp.20.000,- . Sebanyak 60% memiliki pendapatan Rp. 20.001 sampai Rp.50.000,- Sebanyak 8,3% memiliki penghasilan lebih besar dari Rp. 50.000,- (Fuad, 2012, hlm. 96).

Kondisi tersebut tampak kontras dengan persepsi masyarakat yang pada umumnya berpandangan bahwa etnis Tionghoa dilambangkan dengan kisah sukses, penguasaan ekonomi raksasa dan konglomerasi. Kajian terhadap kehidupan masyarakat Tionghoa kelas bawah (*low level society*) masih jarang dilakukan dan hanya sedikit kajian yang menelaah kehidupan masyarakat Tionghoa pada kelas bawah ini (Gondomono, 1996, hlm. 44).

Hidup masyarakat Cina Benteng di Kampung Sewan demikian marginal, serba kekurangan dan hidup sederhana. Namun dalam lingkungan tersebut terdapat kisah keuletan individu-individu yang memilih bekerja di sektor informal, yaitu dengan wirausaha.

Wirausaha menurut Masngudi (1998, hlm. 22) adalah, (a) merupakan naluri yang dibawa sejak lahir oleh seseorang dan karenanya tidak dapat dipelajari, yang disebut dengan istilah "*Born Entrepreneurship*"; dan (b) kewirausahaan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang disebut dengan "*Trained Entrepreneurship*".

Geoffrey G. Meredith (1996, hlm. 42) mengartikan kewirausahaan sebagai "proses untuk melakukan sesuatu yang baru (kreatif) dan mengerjakan sesuatu yang berbeda atau (inovatif) yang bertujuan untuk menghasilkan kekayaan untuk

orang dan nilai tambah terhadap masyarakat”. Kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu usaha baru yang menekankan pada kreativitas dengan menggunakan sumber daya yang ada secara konsisten. Kewirausahaan dilakukan untuk mencapai keuntungan maksimal bagi perusahaan.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kewirausahaan. Secara garis besar faktor tersebut dibedakan dalam faktor yang bersifat internal dan yang bersifat eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu meliputi keluarga, agama atau keyakinan, kultur atau budaya yang melekat dan mewarnai kehidupan. Faktor-faktor yang bersifat eksternal meliputi: lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat (Ahmadi, 2008, hlm xiv).

Mayoritas mutlak masyarakat etnis Tiongkok di Sewan adalah pedagang. Bahkan, menurut penelitian Fuad (2012, hlm. 94), dari total sampling responden dalam wawancara sebanyak 60 orang, keseluruhan responden tersebut 100%, merupakan kalangan yang bermata pencarian pedagang. Keenam puluh responden tersebut, terdiri dari pedagang makanan dan minuman (sebanyak 90%), pedagang bensin eceran (sebanyak 3,3%), sisanya adalah pedagang teh, pedagang VCD, penjual kayu, dan penjual alat rumah tangga (masing-masing sebanyak 1,6 %).

Berdasarkan data tersebut di atas, maka terdapat gambaran bahwa komunitas Tionghoa di Sewan bukan merupakan penguasa ekonomi. Masyarakat berada dalam kategori *low level class*, di mana mereka dari berdagang kecil-kecilan.

Dikenal dengan sebutan “Cina Benteng” atau “Hitachi” (Hitam tapi China), dengan kondisi serba kekurangan, masyarakat Sewan tersebut tidak lantas meninggalkan adat istiadat dan budaya dari leluhurnya. Di tangan deraan himpitan kesulitan perekonomian, masyarakat Sewan dikenal tetap memegang teguh tradisi / adat istiadat leluhur mereka. Beberapa tradisi leluhur yang masih dipertahankan, antara lain ritual persembahyangan dan perkawinan tradisional *Chio Tao*. Dalam pelaksanaan perkawinan tradisional, orang Tionghoa Sewan akan mempertahankan kesenian mereka, antara lain musik gambang kromong dan tarian cokek. Musik gambang kromong dan tarian cokek, yang wajib ada dalam tata ritual perkawinan orang Tionghoa Sewan, adalah merupakan akulturasi antara

masyarakat China Benteng dengan masyarakat Betawi (Julianto , 2009, hlm. 166 & 181).

Keseluruhan elemen kehidupan masyarakat Tionghoa di Sewan, merupakan hal yang sangat menarik untuk menjadi kajian pendidikan IPS, karena sarat nilai-nilai. Keberadaan masyarakat Tionghoa di Sewan akan mengajarkan pada semua pihak mengenai banyak hal. Makna nilai perjuangan hidup, nilai-nilai wirausaha, dan semangat mempertahankan kebudayaan leluhur di tengah kesulitan ekonomi mereka yang tidak beruntung, adalah hal utama yang bisa menjadi pembelajaran dalam keilmuan Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial (PIPS).

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai salah satu mata ajar, mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat secara interdisipliner. Masyarakat dipandang sebagai totalitas atau integritas dari berbagai sudut pandang ilmu sosial, sehingga masyarakat dalam IPS tidak tersekat-sekat secara monodisipliner. Hal ini memungkinkan IPS memiliki padangan yang komprehensif dalam mengkaji masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan. Misi IPS mengantarkan peserta didik agar mampu mengenal masyarakat dan lingkungannya, mampu beradaptasi bahkan menjadi agen perubahan, diharapkan berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah sosial sesuai psikologi perkembangan peserta didik (Maryani, 2011, hlm 2)

Selama ini pembaharuan pendidikan lebih banyak berkaitan dengan faktor akademik guru. Sementara itu, faktor lain seperti faktor sosial dan budaya dan religi kurang mendapat perhatian. Aspek metodologis lebih banyak diperhatikan dari pada aspek sosial dan budaya subjek peserta didik. Akibatnya, kualitas dan produktivitas baik proses maupun hasil sangat memprihatinkan, yang seharusnya sarat dengan muatan paedagogis dan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, sehingga mereka memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsanya dalam proses kehidupan masyarakat. Perancangan dan pengembangan pendidikan di sekolah, logikanya harus lebih mengedepankan aspek sosial dan budaya, sebagai pra-kondisi dan pembekalan awal kepada generasi muda agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab (NCSS, 1994; Lasmawan, 2005).

Akomodasi nilai-nilai sosial dan budaya dan religi dalam konteks pembelajaran IPS bisa dilakukan dengan memasukkan aspek sosial budaya masyarakat, mulai dari saat perancangan program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian terhadap capaian hasil belajar siswa (Hasan, 2006, hlm. 15). Hal ini penting dilakukan dengan harapan bahwa melalui nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat, melalui proses pembelajaran akan menjadi nilai-nilai yang dihayati dan diinternalisasi serta dipahami oleh peserta didik baik sebagai warga masyarakat maupun secara individual.

Preposisi tersebut di atas, sejalan dengan penekanan yang diberikan oleh Somantri (2001, hlm 125), yang mengatakan bahwa pembelajaran IPS di sekolah harus mampu menjembatani dan memfungsikan segala aspek sosial dan budaya masyarakat dalam proses pembelajaran yang kondusif, sehingga peserta didik mempunyai ketahanan dan literasi terhadap masalah-masalah sosial dan budaya masyarakatnya.

Pembelajaran IPS sebagai proses sosialisasi dan pembudayaan manusia, memanusiaikan manusia (Stahl, 2008, hlm. 76) harus mampu mengkondisikan dan memediasi pengembangan potensi peserta didik secara optimal, sehingga mereka benar-benar merasakan dampak dan manfaat dari belajarnya (*meaningful learning*). Untuk itu, pembelajaran yang dilakukan di sekolah hendaknya tidak terlepas dari referensi sosial dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Referensi sosial-budaya jika digunakan dalam pengembangan pendidikan, diduga akan menghindarkan para pemikir, pengambil kebijakan, dan para pelaksana serta pelaku pendidikan dari kondisi “keterbelengguan” dan “determinisme” pemikiran pendidikan (Al Muchtar, 2014; Lasmawan, 2005, hlm. 98).

Iklim pembelajaran dan model pengorganisasian materi ajar yang termuat dalam silabus (kurikulum operasional) hendaknya tidak hanya mengandung rekayasa “*instrumentalistik*”, sehingga semakin menjauhkan kodrat dan bakat peserta didik yang terlepas dari referensi sosial budaya kemasyarakatan (Arthur 2000; Somantri, 2001). Sejalan dengan konsepsi tersebut, berdasarkan pengamatan dan antisipasi pendidikan pada era *hightech-information* dan pemberlakuan kembali KTSP saat ini, maka tampaknya pembelajaran IPS harus

dapat memainkan peran dan fungsinya secara tepat dan komprehensif, sehingga mampu menjauhkan peserta didik dari dampak negatif revolusi sosial-budaya gelombang ketiga (Hasan, 2006; Toffler, 1980). Untuk itu, pembelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama, yang secara umum peserta didiknya masih ada dalam usia operasional-formal (Piaget & Inhelder, 2010, hlm. 15-32), memerlukan instrumen-instrumen khusus pembentukan pribadi dan tata nilai yang nantinya menjadi keyakinan yang dimiliki siswa. Untuk mencapai hal itu, pembelajaran IPS di sekolah harus didukung oleh model pengorganisasian materi, model pembelajaran, buku ajar, dan perangkat penilaian yang berwawasan sosial budaya, sehingga memungkinkan peserta didik mencapai tingkat multiliterasi sosial budaya yang optimal (Piaget, 1980, hlm. 76).

Pendekatan sosial budaya merupakan pengorganisasian materi yang menghadirkan kondisi riil kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dimensi sosial maupun budaya secara komprehensif ke dalam kelas dalam suasana yang terbuka, aktual, dan faktual (NCSS, 1994; Jarolimek, 1986). Melalui kenyataan ini, dimensi sosial budaya di kelas diharapkan siswa merasa belajar dalam realitas kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak mengalami *shock-learning situation* (Woolever, R & Scoott, K.P. , 1990, hlm. 123).

Guru diharapkan melakukan strategi pembelajaran yang baik agar motivasi belajar siswa lebih meningkat. Artinya, bagaimana seorang guru harus berperan dengan baik agar para peserta didiknya tidak bosan menerima pelajaran IPS. Seorang guru disamping mentrasfer pengetahuan dasar, juga menanamkan nilai-nilai moral. Tentu nilai moral ini sangat penting karena menjadi landasan bagi para peserta didik untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan standar benar dan salah. Guru bertanggung jawab terhadap siswa yang lulus dari sekolah dasar memiliki nilai-nilai moral yang sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma hukum. Pendidikan moral ini sangat penting dan menjadi tolok ukur seseorang yang berpendidikan. Hal yang memprihatinkan jika seorang anak pandai secara akademis atau secara intelektual, namun tidak mampu memerankan dirinya sebagai seorang yang berperilaku baik. Hal ini tentu menjadikan dia cacat bahkan tidak akan dihargai dalam pergaulan di masyarakat. Hasil pendidikan yang

dilihat oleh masyarakat yang pertama kali adalah sikap moral dari lulusan lembaga pendidikan. Sikap moral ini menjadi penentu seseorang sukses atau tidak dalam menjalani kehidupan di masyarakat, karena masyarakat tidak akan memandang kepandaian seseorang, prestasi seseorang dalam bidang eksakta, misalnya atau dalam bidang hitung menghitung jika moralnya tidak baik (Suastika, 2011, hlm. 1).

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Pada hakikatnya IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk *integrated sciences* dan *integrated social studies*. Muatan IPS berasal dari sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Mata pelajaran ini mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan siswa tentang masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan program pendidikan yang berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan social. Tujuan pendidikan IPS menekankan pada pemahaman tentang bangsa, semangat kebangsaan, patriotisme, dan aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau *space* wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Kemendikbud, 2013, hlm. 97).

Dalam program pendidikan dasar di Indonesia, mata pelajaran IPS mempunyai beban jam yang hampir sama dengan bidang studi IPA atau Matematika. Walaupun memiliki beban jam pelajaran yang hampir sama dengan kedua bidang studi tersebut, IPS bila tidak dikelola dengan baik dalam pembelajaran, memiliki peluang untuk menjadi mata pelajaran yang membosankan, misalnya siswa tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran serta buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar.

Al Muchtar (2014, hlm. 5) menguatkan hal tersebut dalam kutipannya sebagai berikut, "Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bidang studi yang menjemukan dan kurang menantang minat belajar siswa, bahkan lebih dari itu dipandang sebagai "kelas dua" oleh siswa maupun oleh orang tua siswa ". Hal ini diduga bersumber pada lemahnya mutu proses belajar.

Kelemahan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial selama ini adalah kurang mengikutsertakan peserta didik dalam proses pembelajaran (*teacher centred*). Guru tidak mengembangkan berbagai pendekatan maupun metode dalam pembelajaran. Kebanyakan para pendidik menempuh cara yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan metode ceramah dan mengandalkan penghafalan fakta-fakta belaka. Menurut Somantri (2001, hlm. 303-304) salah satu kelemahan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah menekankan pada strategi ceramah dan ekspositori atau *transfer of knowledge* yang menjadikan guru sebagai pusat kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, dalam pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial nilai sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat atau peserta didik belum dijadikan sebagai sumber belajar. Sehingga kadangkala peserta didik tidak merespon kejadian-kejadian yang disekitarnya. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Al Muchtar (2014, hlm. 220), yaitu :

”...Nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lingkungan peserta didik tidak dijadikan sumber pelajaran IPS. Kalaupun dilakukan amat terbatas hanya sebagai bahan pelengkap tidak merupakan inti bahasan untuk melatih kemampuan penalaran nilai. Dampaknya pendidikan IPS tidak mendekatkan dan mengakrabkan peserta didik dengan lingkungan sosial budayanya. Akibatnya pendidikan IPS belum mampu berperan sebagai media bagi pengembangan kemampuan penalaran nilai bagi peserta didik.”

Terkait dengan permasalahan di atas, maka upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar pendidikan IPS yang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran atau *student centered*, merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu upaya yang dapat menjembatani permasalahan tersebut yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam proses belajar mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah sangat penting. Hal ini ditegaskan Sumaatmadja (1980:16) bahwa:

“Ilmu pengetahuan sosial adalah bidang-bidang yang digali dari kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan obyeknya, merupakan suatu bidang pengetahuan yang tidak berpijak kepada kenyataan. IPS yang

tidak bersumber kepada kenyataan tidak mungkin mencapai sasaran dan tujuannya, dan tidak akan memenuhi tuntutan masyarakatan.”

Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sayakti (2003) mengenai pemanfaatan lingkungan mengatakan bahwa pembelajaran yang menggunakan konsep lingkungan hidup sebagai sumber belajar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan perolehan hasil belajar yang diselenggarakan oleh guru menjadi bermakna. Sedangkan menurut Istianti (2004) pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar sangat efektif dalam memberikan kedalaman makna materi dan pengertian kepada siswa berkenaan dengan topik yang menjadi bahan pelajaran. Kebermaknaan pengembangan materi terkait dengan kinerja guru dalam menciptakan pola kegiatan belajar yang kreatif dan inovatif. Menurut Wiriaatmadja (2002, 307-308) proses belajar mengajar ilmu-ilmu sosial akan tangguh apabila melakukan banyak kegiatan aktif, seperti:

1. *Belajar mengajar aktif harus disertai dengan berfikir reflektif dan pengambilan keputusan selama kegiatan berlangsung, karena proses pembelajaran berlangsung dengan cepat dan peristiwa dapat berkembang tiba-tiba.*
2. *Melalui proses belajar aktif, siswa lebih mudah mengembangkan dan memahami pengetahuan baru mereka.*
3. *Proses belajar aktif membangun kebermaknaan pembelajaran yang diperlukan agar peserta didik dapat mengembangkan pemahaman sosialnya.*
4. *Peran guru secara bertahap bergeser dari berbagai sumber pengetahuan atau model kepada peranan yang tidak menonjol untuk mendorong siswa agar mandiri dan disiplin.*
5. *Proses belajar mengajar ilmu-ilmu sosial yang tangguh menekankan proses pembelajaran dengan kegiatan aktif di lapangan untuk mempelajari kehidupan nyata dengan menggunakan bahan dan keterampilan yang ada di lapangan.*

Memasuki abad ke-21, banyak terdapat tuntutan kehidupan yang harus disikapi dan direspon dengan tepat. Termasuk juga pada dunia pendidikan. Sebagaimana kutipan Trilling dan Fadel (2009: xxviii): *“...the world has changes so fundamentally in the last few decades that the roles of learning and education in day-to-day living have also changed forever.”*

Perkembangan abad mutakhir, seluruh warga negara tidak hanya dituntut memiliki kemampuan standar dalam hal baca, tulis dan berhitung. Namun juga

wajib memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih maju lagi. Salah satu kemampuan tersebut menurut Metiri Group (2009) adalah kemampuan komunikasi interaktif, ketrampilan social dan personal yang meliputi: (1) bekerja dalam kelompok dan bekerja sama (kolaborasi); (2) tanggung jawab pribadi dan kelompok; (3) komunikasi dua arah. Selain mencakup pada kemampuan literasi digital, inventif nalar, dan aplikatif kekinian.

Menjawab kebutuhan tersebut, penting bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk membawa siswa didik mengerti tentang keberadaan masyarakat etnis Cina Benteng sebagai bagian integral Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat J. A. Banks dan C.A. Banks (2008, hlm. 10), bahwa “...*Children are not born prejudiced, but by the time they enter kindergarten they may process misconceptions and negative attitudes about culture group different from their own*”. Hal ini dapat mencegah terjadinya kesenjangan prasangka terhadap para etnis Cina Benteng, dan meminimalisir kemungkinan terjadinya peristiwa seperti Peristiwa Valckenier tahun 1740 dan Peristiwa Kekerasan Anti Cina Tahun 1998.

Faktor lain yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang budaya masyarakat China adalah masih sangat jarangunya materi tentang Sumber Pembelajaran IPS yang mengetengahkan tentang Pecinan. Serta keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang implementasi dan transformasi nilai-nilai budaya, terutama tentang kewirausahaan dan ritual perkawinan, dari masyarakat keturunan Tionghoa.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini berada pada kajian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan cara mengambil data dari etnis Cina Keturunan tentang cara bagaimana nilai-nilai budaya mereka ditransformasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana mereka mentransformasi nilai-nilai tersebut kepada generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan penelitian ini diajukan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa sajakah nilai-nilai budaya yang masih dipegang secara kuat oleh masyarakat etnis Tionghoa di Sewan kota Tangerang?
2. Bagaimanakah masyarakat etnis Tionghoa di Sewan kota Tangerang mensosialisasikan nilai-nilai budaya itu kepada generasi berikutnya?
3. Bagaimana strategi mentransformasikan nilai-nilai budaya masyarakat etnis Tionghoa di Sewan kota Tangerang sebagai sumber pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan nilai-nilai budaya apa saja yang secara kuat masih dipegang oleh masyarakat etnis Tionghoa di Sewan kota Tangerang.
2. Menganalisis cara masyarakat etnis Tionghoa di Sewan kota Tangerang mensosialisasikan nilai-nilai budaya itu kepada generasi berikutnya.
3. Menganalisis strategi mentransformasikan nilai-nilai budaya masyarakat etnis Tionghoa sebagai sumber pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat dijadikannya sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang pendidikan IPS, khususnya pada kajian-kajian budaya lintas etnis baik dalam konteks sekolah ataupun masyarakat, terutama berkaitan erat dengan pelaksanaan kurikulum 2013. Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang multi etnik dengan unsur kajiannya dalam konteks peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: Sebagai bahan masukan bagi guru bidang studi IPS, terutama dalam melakukan proses pembelajaran hendaknya dapat memperhatikan pemanfaatan lingkungan sekitar yang sarat akan unsur sikap dan nilai (*attitudes and values*) positif yang bersifat multietnis. Pembelajaran IPS sarat dengan nilai, sehingga seyogyanya pembelajaran IPS bukan hanya diarahkan sekedar transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan adanya keseimbangan antara unsur yang ada meliputi : Pengetahuan (*Knowledge*),

Keterampilan (*Skills*), Sikap dan nilai (*Attitudes and values*). Dengan melakukan alternatif inovasi pembelajaran IPS dengan mengaitkan terhadap unsur multikultural dari negara kesatuan Republik Indonesia, diharapkan akan menumbuhkan penerimaan dan pemahaman terhadap budaya lain di luar diri siswa didik, dan bermuara pada aksi nyata siswa didik sebagai warga negara kelak (*Citizen action*). Dengan begitu, terwujudnya tujuan IPS yakni menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*) akan mudah dicapai. Sedangkan bagi pemegang kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memaknai secara positif kebudayaan masyarakat etnis Tionghoa sebagai suatu kekayaan lokal bukan benda.